

## VISI, MISI, STRATEGI DAN AGENDA PEMBANGUNAN

### 3.1 Visi dan Misi Kabupaten Garut

Masa depan Pemerintahan Kabupaten Garut akan ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dengan segala aspeknya; yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan hal itu Kabupaten Garut memiliki Visi filosofis yang berorientasi kedepan, menuju kehidupan yang lebih baik.

Karena itu dapat pula dikatakan bahwa Visi merupakan cita-cita; cita-cita Kabupaten Garut tidak dibatasi oleh waktu, namun hanya dibatasi oleh 'ruang' yakni "Kabupaten Garut", cita-cita dimaksud dinyatakan dalam Visi **"Terwujudnya Garut *Pangirutan* yang *Tata Tengtrem Kerta Raharja* Menuju Ridla Allah"**

Cita-cita ideal Kabupaten Garut, tercermin dari kalimat "*tata tengtrem kerta raharja*" yang artinya, berkat segala peraturan dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen, maka akan mewujudkan ketentraman yang dapat menimbulkan semangat kerja, sehingga akhirnya tercapailah kebahagiaan hidup lahir dan bathin.

Untuk mewujudkan cita-cita ideal Garut, seyogyanya terlebih dahulu dimulai dengan me"*raharja*"kan masyarakat, terutama kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang diwujudkan secara bertahap dan sistimatis akan berdampak terhadap tumbuhnya keamanan (*kerta*) yang diikuti ketrentaman (*tengtrem*). Apabila tahapan ini sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka penataan kehidupan dan lingkungan melalui penegakkan peraturan akan lebih mudah dilaksanakan.

Misi merupakan tugas yang diemban oleh masyarakat Kabupaten Garut dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan yang mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Misi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yang menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- d. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- e. Memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi lokal dan mekanisme pasar.
- f. Mewujudkan Garut sebagai daerah agrobisnis dan agroindustri.
- g. Mewujudkan Garut sebagai daerah pariwisata disertai pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal.

### **3.2 Visi dan Misi dan Motto Pemerintah Kabupaten Garut**

Visi Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan adalah ***"Pengarusutamaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Guna mempercepat Pencapaian Visi Garut Tahun 2009"***

Untuk lebih mendefinisikan kesejahteraan masyarakat dalam Visi Pemerintah telah dirumuskan misi yang harus ditempuh yang didalamnya merupakan gambaran kesejahteraan yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu:

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Mengurangi disparitas pembangunan Garut Selatan dengan Garut Utara dan Tengah;
3. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis perdesaan;
4. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Mempertahankan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;

Adapun motto pemerintah kabupaten Garut adalah *Garut Bangkit, Garut Berprestasi*. Makna Garut bangkit artinya bahwa Garut yang dikategorikan daerah tertinggal harus bangkit untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain; Garut berprestasi artinya bahwa untuk bisa disejajarkan dengan daerah lainnya maka perlu ditingkatkan prestasi-prestasi baik dalam bidang agama, sosial, pendidikan, olah raga, pemerintahan dll.

### **3.3 Strategi Pembangunan Kabupaten Garut**

Strategi dan kebijakan pembangunan dalam 3 tahun kedepan yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan fokus UMKM serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pada hakekatnya juga mengandung nilai-nilai pembangunan sosiokultural masyarakat. Strategi pembangunan dalam ekonomi pembangunan memberikan gambaran bahwa antara pertumbuhan dan pemerataan selalu menghasilkan trade-off, artinya jika menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerataan harus dirugikan. Profil strategi pertumbuhan dalam RPJMD ini adalah yang berbasis UMKM yang notabene merupakan sektor usaha yang menjadi bagian terbesar dari mata pencaharian masyarakat, sehingga "kue" hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau usaha besar, tetapi justru terdistribusi pada segmen masyarakat menengah dan bawah. Oleh karena itu, dual track strategy merupakan upaya untuk mengembangkan strategi pembangunan yang pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Walaupun sampai saat ini konsumsi masih mendominasi struktur pertumbuhan, namun demikian tiga tahun kedepan, diharapkan dapat diupayakan percepatan investasi baik yang berfasilitas maupun non-fasilitas untuk mendukung fundamental ekonomi Kabupaten Garut khususnya pada perkembangan sektor UMKM.

Dengan basis investasi yang memadai, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat yang terdiri dari:

- (1) Pemenuhan hak atas pangan;
- (2) Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan;
- (3) Pemenuhan hak atas pendidikan;
- (4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha;
- (5) Pemenuhan hak atas perumahan;
- (6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi;
- (7) Pemenuhan hak atas tanah;
- (8) Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (9) Pemenuhan hak atas rasa aman; dan
- (10) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan ( dual track strategi) ditempuh melalui :

- (1) revitalisasi pertanian.
- (2) peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata;
- (3) pengembangan industri;
- (4) pengembangan koperasi dan UMKM;
- (5) pengelolaan BUMD;

Tiga tahun kedepan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama diprioritaskan terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan yang berkualitas; peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat meliputi 3 aspek penting yaitu:

- (1) aspek menghormati hak-hak dasar masyarakat,
- (2) aspek melindungi hak-hak dasar masyarakat,
- (3) aspek pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dapat terwujud, begitu pula untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Garut maka perlu ditunjang dengan percepatan terealisasinya infrastruktur,

seperti : Jalan lingkaran selatan, Peningkatan Jalan-jalan Kabupaten dan jalan Desa, Terealisasinya Bendungan Copong, pembangunan gedung olah raga dan lain-lain. Disamping infrastruktur ekonomi, perlu fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dukungan reformasi birokrasi terhadap penerapan dual track strategi sangat diperlukan terkait dengan fungsi-fungsi layanan publik. Hal ini akan dapat dicapai melalui upaya – upaya penataan struktur organisasi yang tidak hanya efisien namun harus efektif. Disamping itu peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparatur pemerintah merupakan upaya penting pula untuk membangun sebuah birokrasi yang kondusif dalam upaya fasilitasi layanan publik yang lebih baik. Dukungan penting lain dari dual track strategy ini adalah pembenahan kebijakan publik dan regulasi. Pembenahan kebijakan publik dan regulasi diarahkan dalam rangka menciptakan iklim kondusif yang akan berpengaruh terhadap kinerja investasi dan ekonomi.

Dalam implementasinya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan perbaikan data base dan management pembangunan serta pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan administrasi pemerintahan. Perbaikan data base dan management pembangunan ini dapat dilakukan dengan penerapan e-government yang ditujukan untuk membangun desain kebijakan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, pemberian jasa publik dilakukan dengan lebih murah dan efisien. Agar strategi pembangunan Kabupaten Garut dapat mencapai kinerja agregat 2009, maka perlu dikembangkan alternatif pembiayaan guna mengatasi keterbatasan dana PAD maupun APBD/APBN, antara lain pemanfaatan aset-aset Pemerintah Kabupaten dan Propinsi, sharing pembiayaan antara Pemerintah Pusat – Propinsi – Kabupaten, mengembangkan kemitraan antara Pemerintah dengan swasta dan masyarakat serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan masyarakat melalui investasi.

Optimasi pelaksanaan dual track strategy, diharapkan akan mampu menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pemenuhan pangan, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak dasar lain sesuai dengan kemampuan fasilitasi, termasuk upaya menghormati maupun melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan dual track strategy maka ditetapkan 6 (enam ) agenda pembangunan Kabupaten Garut untuk Tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Mengurangi disparitas pembangunan Garut selatan dengan Garut Utara dan Tengah;
3. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan;
4. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Mempertahankan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;.

### **3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut**

Berdasarkan 6 (enam) agenda pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, maka ditetapkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama
2. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Mengurangi disparitas pembangunan Garut selatan dengan Garut Utara dan Tengah dengan percepatan pembangunan infrastruktur;
4. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan;
5. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan memacu kewirausahaan;

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
7. Mempertahankan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dan penataan ruang;.
8. Peningkatan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
9. Revitalisasi proses otonomi daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 akan diterjemahkan kedalam pokok-pokok arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2006-2009.

#### **3.4.1 Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama**

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Kabupaten Garut yang aman dan damai dapat diwujudkan.

## **A. SASARAN**

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama sampai dengan tahun 2009 adalah:

### **1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**

Tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah

### **2. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan**

Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta pengembangan nilai-nilai keagamaan

### **3. Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Terbinanya individu-individu yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sehingga tercipta masyarakat beragama yang baik, serta terbinanya calon-calon ahli ilmu agama yang kompeten

### **4. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**

Meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama

### **5. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahan sosial

### **6. Penelitian dan Pengembangan Agama**

Tersedianya data dan informasi keagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan bidang agama

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
2. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
3. Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
5. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
6. Penelitian dan Pengembangan Agama

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

#### **1. Program Peningkatan Pendidikan Agama**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, baik formal maupun non formal

#### **Kegiatan:**

- Pembangunan Sarana dan Prasarana keagamaan meliputi: Pondok Pesantren, Madrasah, Majelis Ta'lim, TKA/TPA, dan Masjid
- Pengembangan pesantren kilat
- Pembinaan Keagamaan di SD, SMP, dan SMA.
- Rehab Pontren
- Pelatihan Guru Agama Swasta

## **2. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**

Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional.

### **Kegiatan:**

- Peningkatan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;
- Meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama;

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

### **Kegiatan:**

- Pembinaan keluarga sakinah/ sukinah/ hitasukaya/ bahagia;
- Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi umat beragama;
- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya;
- Sarana dan prasarana keagamaan

**2. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta pengembangan nilai-nilai keagamaan

**3. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahan sosial

**4. Program Penelitian dan Pengembangan Agama**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi keagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan bidang agama.

**3.4.2 Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

Dalam rangka untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka prioritas pembangunan diletakkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Garut. Sebagaimana diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Wajib belajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan pemerataan pendidikan. Meningkatnya pendidikan rata-rata penduduk akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan menerapkan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya pendidikan juga menciptakan konsumen potensial bagi produk-produk yang mengandung teknologi. Meningkatnya pembangunan pendidikan akan meningkatkan proses pembangunan masyarakat ekonomi dan memantapkan langkah kita dalam

memasuki tahap industrialisasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat lebih tinggi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

#### **A. SASARAN**

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Sasaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun 2009.

Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan ditandai oleh meningkatnya taraf pendidikan penduduk Kabupaten Garut melalui:

1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah;
3. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
4. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
5. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antarperkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
6. Tersedianya standar pelayanan pendidikan minimal untuk tingkat kabupaten;

7. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
8. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;
9. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
10. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
11. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;
12. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
13. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
14. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
15. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan;
16. Meningkatnya kualitas pendidikan;
17. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;
18. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut

## **1. Kebijakan Perluasan dan Pemerataan**

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan :

- a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan pemberian subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin;
- b. Peningkatan sarana prasarana, pembangunan USB di SLTP dan SLTA;
- c. Peningkatan perluasan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Peningkatan penyelenggaraan SMK Kecil di SMP dan Pondok Pesantren.

## **2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan**

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen melalui :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE);
- c. Melaksanakan akselerasi pendidikan di semua jenjang pendidikan; Rencana
- d. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja;
- e. Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- f. Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri.

### **3. Peningkatan Manajemen**

Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
- b. Pemberdayaan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah dengan penciptaan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik, dengan mengoptimalkan peran komite sekolah;
- c. Penyusunan strategi, perencanaan serta manajemen pembinaan program data.

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

#### **1. Program Pendidikan Usia Dini**

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul

Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

## **2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjangkauan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/ MI/ Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/ MI/ Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

### **3. Program Pendidikan Menengah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun nonformal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/ madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

### **4. Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

### **5. Pendidikan Non Formal**

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

## **6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, dan terjadinya pemerataan guru di setiap daerah serta untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## **7. Peningkatan Pendidikan Agama**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, baik formal maupun non formal

## **8. Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan.

## **9. Lingkungan sehat**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat.

**10. Upaya kesehatan masyarakat**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa.

**11. Pencegahan dan penanggulangan penyakit**

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, TB, HIV/AIDS, pneumonia dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus dan lain-lain.

**12. Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan Balita.

**13. Sumber Daya Kesehatan**

Program ini ditujukan meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin.

**14. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan**

Program ini ditujukan untuk mengembangkan manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan.

### **15. Kesehatan Reproduksi Remaja**

Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

### **16. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar sadar, mau dan mampu hidup sehat.

### **17. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas kepada masyarakat dan Gakin.

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola Institusi Keolahragaan.

### **2. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan prestasi olahraga masyarakat.

### **3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

#### **4. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

#### **3.4.3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Garut Selatan Dengan Garut Utara Dan Tengah Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, secara topografi mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Akibat pengaruh adanya daerah pegunungan, daerah aliran sungai dan daerah dataran rendah pantai, maka tingkat kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun potensi serta permasalahan yang dimilikinya juga bervariasi.

Berdasarkan Laporan Akhir RTRW Kabupaten Garut tahun 2001-2010, wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi 3 (tiga) orde yaitu :

- a. Orde I merupakan pusat utama dari seluruh kegiatan di Kabupaten Garut yang meliputi Kecamatan Garut Kota dan Tarogong.
- b. Orde II merupakan daerah yang memiliki sub pusat pengembangan yang tidak dapat dijangkau oleh orde pertama secara langsung. Unit wilayah ini dapat dijadikan simpul koleksi dan distribusi di tingkat lokal. Wilayah ini meliputi Kecamatan Cikajang, Pameungpeuk, Cibatu, Malangbong, dan Bungbulang.
- c. Orde III merupakan pusat pertumbuhan bagi daerah belakang yang mempunyai fungsi sebagai penggerak pertumbuhan. Unit wilayah ini tidak dapat dijadikan simpul koleksi dan distribusi lokal, akan tetapi basis pertumbuhan masih dipengaruhi oleh wilayah inti dan pendukung.

Secara makro Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan keterkaitan eksternal yang relatif tinggi. Oleh karena itu perlu diperhatikan perwujudan interaksi antara Kabupaten Garut dengan wilayah lain secara lebih optimal.

Aspek dasar yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Jaringan regional Bandung–Ciamis (dan seterusnya) yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah utara Kabupaten Garut
2. Adanya interaksi Kabupaten Garut dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya terutama Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Sumedang
3. Optimasi pemanfaatan lahan untuk mengembangkan budidaya komoditi yang sifatnya kompetitif dengan wilayah lain.

Sedangkan secara mikro pertimbangan internal lebih menekankan pada usaha pemerataan perkembangan antar sub-wilayah (misal wilayah utara dan selatan) yang simultan dan terpeliharanya daya dukung lingkungan serta stabilitas internal wilayah. Aspek dasar yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Pengembangan tata ruang mikro harus dapat menjawab tantangan isu kesenjangan wilayah antara wilayah yang lebih berkembang (bagian utara) dengan wilayah yang relatif kurang berkembang (bagian Selatan).
2. Perlunya pemantapan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung
3. Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya

Disamping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan wilayah antara wilayah utara-tengah dan selatan, serta antara wilayah kota–desa. Disamping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan maupun sarana prasarana.

#### **A. Isue strategis**

1. Pembangunan wilayah di Kabupaten Garut dihadapkan pada masalah pokok terjadinya kesenjangan antara Garut Tengah, Utara dan Selatan serta antara kota dan desa. Sementara itu

pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumberdaya manusia, rendahnya peranan swasta dalam pembangunan serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.

2. Pembangunan infrastruktur masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala, sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan secara regional masih lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih kritis akibat kurangnya dana rehabilitasi dan pemeliharaan, seringnya terjadi bencana alam dan memburuknya kualitas konstruksi jalan. Demikian pula infrastruktur lainnya seperti listrik, energi dan telekomunikasi
3. Penyediaan infrastruktur terkait dengan pendayagunaan sumberdaya air terutama untuk penyediaan air irigasi masih memerlukan perhatian besar.
4. Upaya pemekaran wilayah (kecamatan dan desa) belum sepenuhnya mampu meningkatkan dan mempercepat pembangunan wilayah
5. Ketersediaan air minum di perkotaan dan pedesaan masih rendah

## **B. Sasaran**

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
2. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah serta peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah.
3. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.
4. Meningkatnya pelayanan informasi tentang transmigrasi
5. Meningkatnya pelayanan informasi tentang sosial
6. Memelihara kualitas jalan/ jembatan yang kondisinya rusak ringan sehingga tetap berfungsi sebagai prasarana mobilitas kegiatan masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas jalan/ jembatan kabupaten yang telah dipelihara secara rutin.
8. Meningkatkan kembali fungsi dan kemampuan pelayanan jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat
9. Membuka akses daerah terisolir.
10. Menghubungkan lalu lintas barang/ orang di daerah terisolir
11. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;
12. Terkendalinya potensi konflik air;
13. Terkendalinya pemanfaatan air tanah;
14. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
15. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
16. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;
17. Meningkatnya patisipasi aktif masyarakat;
18. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
19. Tersedianya data dan system informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses
20. Tersedianya jaringan listrik di desa terpencil yang tidak terjangkau oleh PLN.
21. Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kumuh dan tidak layak huni.
22. Penurunan luasan kawasan kumuh
23. Terpenuhinya kebutuhan air bersih di Kabupaten Garut.
24. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
25. Semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces.
26. Meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air bersih.
27. Terciptanya tingkat penerangan yang optimal
28. Meningkatnya efek visual yang optimal dan pengarah visuall yang jelas
29. Terciptanya sistem penerangan jalan umum yang efesien dan tepat

30. Terwujudnya poros jalan yang menghubungkan antar desa diselatan

**C. Arah Kebijakan**

1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Garut.
2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain, terutama melalui peningkatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
3. Membangun kembali kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat dan membangun kembali serta merehabilitasi infrastruktur yang rusak di wilayah-wilayah kritis dan rawan bencana.
4. Menyeimbangkan pertumbuhan wilayah melalui:
  - Peningkatan peran dan fungsi perwilayahan.
  - Memperkuat peran dan fungsi pelayanan kota-kota SWP.
5. Peningkatan pemahaman dan pelayanan serta informasi tenaga kerja sosial dan transmigrasi
6. Pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
7. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air
8. peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
9. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis

10. Pengendalian daya rusak air dalam penanggulangan banjir dengan mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
12. Peningkatan peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air, untuk mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
13. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan sumber daya air yang didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan.
14. Menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah terpencil dan perdesaan.
15. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien.
16. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Garut
17. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
18. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
19. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
20. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan perumahan
21. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air bersih dan air limbah dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.

22. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah Rumah Tangga akhir tahun 2010.
23. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.
24. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum.
25. Meningkatkan sistem penerangan jalan umum yang efisien dan tepat
26. Meningkatkan sistem penerangan jalan umum sebagai pengarah jalan
27. Meningkatkan efek visual yang optimal dan pengarah visual yang jelas

#### **D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

##### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

###### **1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan untuk memelihara kualitas kemantapan jalan dan jembatan sebagai sarana penunjang perekonomian.

###### **Kegiatan:**

- Pemeliharaan jalan secara rutin
- Pemeliharaan jalan secara periodik;
- Pemeliharaan jembatan;
- Pengadaan aspal untuk stimulan jalan desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Garut.

## **2. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan untuk meningkatnya kualitas kemantapan jalan dan jembatan sebagai sarana penunjang perekonomian.

### **Kegiatan:**

- Peningkatan jalan;
- Pembangunan jembatan.

## **3. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air bersih**

Program ini bertujuan meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perdesaan.

### **Kegiatan:**

- Pembangunan SAB sistem perpipaan;
- Pembangunan hidran umum;
- Perlindungan mata air;
- Pembangunan sumur dangkal;
- Pembangunan sumur dalam.

## **4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.**

Program ini bertujuan untuk ketersediaan jaringan irigasi yang memadai;

### **Kegiatan:**

- Rehabilitasi DI ha;
- Pembinaan P3A/GP3A/Forum Koordinasi Daerah Irigasi;

## **5. Program Pengembangan Kawasan Tertinggal**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa, Terkendalinya situasi masyarakat secara kondusif, dan

Terselenggaranya akselerasi pengembangan kawasan tertinggal.

**Kegiatan:**

- Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat dari program PPK;
- Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi tahun 2006 dari Program Raksa Desa;
- Pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP);
- Mengatasi berbagai pengaduan masyarakat berkaitan kenaikan BBM
- Penyusunan model pembangunan daerah tertinggal

**6. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman**

Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat.

**Kegiatan:**

- Jalan Lingkungan
- Trotoarisasi

**7. Program Pengembangan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi**

Program ini bertujuan untuk :

- Tersebaranya informasi pemerintahan dan pembangunan di Kab. Garut,
- Tersedianya sarana dan hiburan melalui media informasi televisi,
- Terbentuknya kelompok informasi masyarakat.

**Kegiatan:**

- penerbitan Buletin Informasi
- Tersedianya sarana dan prasarana pada lokasi P2WKSS
- Terselenggaranya penyuluhan, penerangan dan pemahaman sistem penanggulangan bencana (PM)

**8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**

Terpenuhinya sarana dan prasarana air baku.

**Kegiatan:**

- Pembuatan sumur bor dalam.

**9. Program Penataan Ruang**

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang dan tersusunnya RTBL.

**Kegiatan:**

- Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten;
- Penyusunan RDTR Kota Garut dan Wilayah Garut Selatan;
- Tersedianya peta foto udara;
- Penyusunan RUTR Kecamatan;
- Penyusunan RTBL kecamatan.

## **10. Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan**

Penerapan Pola Tata Desa dan percepatan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

### **Kegiatan:**

- Terciptanya Pola Tata Desa Percontohan.
- Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan andalan;
- Dokumen strategi pencapaian indikator makro pembangunan;
- Tersusunnya kluster industri;
- Tersedianya master plan pengembangan pertanian;
- Terselenggaranya program P2KP.

## **11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Serta Fasilitas LLAJ**

Tersedianya sarana prasarana pelayanan angkutan dan lalu lintas

### **Kegiatan:**

- Rambu-rambu Lalu Lintas;
- Terpasangnya Traffic Light;
- Alat Uji Kendaraan Umum;
- Penataan terminal;
- Penunjuk jurusan;
- Pengadaan Alat Marking Mobile;
- Penataan Sirkulasi Arus Lalu Lintas perkotaan.

## **II. PROGRAM PENUNJANG :**

### **1. Penerangan Jalan Umum**

Tersedianya penerangan jalan umum

**Kegiatan:**

- Terpasangnya tiang PJU;
- Terpasangnya lampu jalan.

**2. Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan prasarana Ketenagalistrikan**

Tersedianya pelayanan listrik di pedesaan.

**Kegiatan:**

- Sambungan rumah;
- PLTMH.

**3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**

Masyarakat pengguna informasi melalui media internet

**Kegiatan:**

- Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan informasi yang valid dan up to date melalui situs internet [garut.go.id](http://garut.go.id).

**4. Pengembangan pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan penyiaran**

Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkoneksi melalui infrastruktur jaringan SIMDA Kabupaten Garut dan Masyarakat Umum

**Kegiatan:**

- Terlaksananya interkoneksi sistem, data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kab. Garut yang terkoneksi pada jaringan SIMDA.

- Dapat diterimanya siaran RSPD di Kec. Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Cikelet, Bungbulang, Cisewu, Talegong, Caringin dan Mekarmukti

## **5. Peningkatan Sektor Teknologi Informasi dan Penyiaran**

Pengelola Jaringan Sistem Informasi pada Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Peningkatan kemampuan operasional dan pengelolaan penyiaran RSPD.

### **Kegiatan:**

- Meningkatnya kemampuan pengelola jaringan dan sistem informasi.
- Terlaksananya pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah berdasar UU No. 32/2002 dan PP No. 11/2005.

### **3.4.4 Memberdayakan Masyarakat Dan Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan**

Berdasarkan perhitungan indikator makro sebagaimana tertuang pada Bab 2 diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Garut tahun 2002 tercatat sebanyak 603.800 jiwa, sedangkan tahun 2003 tercatat sebanyak 338.702 jiwa atau menurun sebesar 43,90% dari tahun 2002, berdasarkan keterangan dari BPS Kabupaten Garut, bahwa perbedaan yang cukup besar antara angka kemiskinan pada tahun 2002 dengan tahun 2003 ini disebabkan adanya perubahan perhitungan angka kemiskinan mulai tahun 2003 dengan menghapus beberapa variabel kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin diestimasikan menjadi 332.750 jiwa atau diestimasikan menurun sebesar 1,76% atau sekitar 5.952 jiwa dari tahun 2003.

Dengan demikian, maka pembangunan manusia di Kabupaten Garut benar-benar diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan. Pada tahun 2005, angka kemiskinan itu, diharapkan semakin menurun hingga menjadi 326.903, atau menurun sebesar 1,94% atau 5.847 jiwa. Jika target itu terpenuhi, itu berarti misi Kabupaten Garut, terutama misi kedua dapat dilaksanakan dengan baik, sekalipun masih perlu terus ditingkatkan pencapaiannya.

#### **A. SASARAN**

1. Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang rumah layak huni dan menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.
2. Tersedianya pemetaan air tanah dan pengembangan pelabuhan laut
3. Tersedianya model posyandu unggul
4. Tersusunnya masalah, keberhasilan dan rencana tindak lanjut program kerjasama Pemda Garut -Unicef
5. Meningkatnya kapasitas pengelola program
6. Tersedianya analisis situasi ibu dan anak Kabupaten Garut
7. Meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak
8. Meningkatnya kapasitas masyarakat
9. Terlaksananya penyusunan buku suseda
10. Tersusunnya buku indikator makro
11. Tersedianya data hasil pendaftaran penduduk (Keppres 88 tahun 2004)
12. Tersedianya Data Statistik Vital Kependudukan (Keppres 88 tahun 2004)
13. Tersedianya data mikro untuk Perencanaan Kegiatan Program baik sektor maupun lintas sector
14. Meningkatnya kualitas pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana
15. Meningkatnya kualitas program melalui penilaian Operasional dan multi indikator dalam program KB.
16. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta KB.

17. Tersedianya alat kontrasepsi dan sarana pelayanan KB.
18. Tersedianya sarana dan prasarana KIE KB.
19. Meningkatnya Koordinasi secara sinergis dalam Momentum Hari Ulang Tahun TNI, Bhayangkara, Hari Kesatuan Gerak PKK.
20. Meningkatnya koordinasi secara sinergis dalam momentum Hari Keluarga Nasional dan Hari Kependudukan.
21. Meningkatnya koordinasi secara sinergis dalam Program P2WKSS
22. Meningkatnya bantuan dasar dan jaminan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, pejuang dan perintis kemerdekaan.
23. Meningkatnya usaha-usaha kesejahteraan sosial.
24. Meningkatnya bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi sosial masyarakat.
25. Meningkatnya dan berkembangnya peran serta masyarakat maupun organisasi masyarakat dalam bidang sosial sehingga Orsos dan Ormas dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam masyarakat.
26. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu.
27. Meningkatnya kemampuan untuk meringankan beban para korban bencana.
28. Meningkatnya upaya-upaya penanggulangan bencana mulai dari tanggap darurat, evakuasi sampai dengan pasca bencana sehingga dapat tertanggulangi secara menyeluruh dan terpadu.
29. Meningkatnya kemampuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam.
30. Meningkatnya kinerja LPM, PKK, RW/RT dan Bumdes
31. Penurunan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan
32. Terwujudnya kepercayaan diri, kemauan dan kemampuan serta taraf kehidupan sosial ekonomi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
33. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan serta Koordinasi dan Jaringan Pengarusutamaan

**B. ARAH KEBIJAKAN**

1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan
2. Pengentasan kemiskinan
3. Pembangunan berbasis pedesaan

**C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

**I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

**1. Pembinaan dan Peningkatan Produksi Pertanian**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan mentah pertanian dan perkebunan rakyat guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendorong produk olahan (*home industri*), intensifikasi pertanian dan perkebunan, optimalisasi lahan berbasis lingkungan dan penanganan marjinal, jaringan irigasi tersier, produksi ikan, Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), produksi ikan di perairan umum, dan mutu dan populasi ternak lebih merata dan tinggi produktivitasnya serta didukung oleh penguatan modal yang memadai.

**Kegiatan:**

- Peningkatan rata-rata produksi mentah
- pengkoordinasian intensifikasi pertanian dan perkebunan melalui perencanaan partisipatif
- peningkatan luasan areal tanam yang diusahakan berbasis lingkungan
- peningkatan produksi ikan
- peningkatan produksi hasil ternak terdiri atas daging, telur dan susu

**2. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kebutuhan, keamanan pangan dan distribusi pangan melalui peningkatan kualitas produksi, mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Garut, melaksanakan upaya diversifikasi pangan dan gizi, upaya pengendalian OPT, menjalin hubungan sinergis antara para pelaku pembangunan peternakan yang disertai perbaikan tatalaksana dan mutu hasil, Intensifikasi lahan pekarangan melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Pengendalian OPT Utama pada komoditi hortikultura, dan Pengembangan jasa layanan saprotan pada wilayah sentra/ pengembangan hortikultura.

**Kegiatan:**

- Menumbuhkan dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan pola konsumsi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan ketersediaan, harga dan distribusi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan pangan.
- mengembangkan produksi peternakan dan hasil olahannya yang berkualitas
- Membentuk KWT di lokasi P2WKSS;
- Membentuk kelompok pengelola pertanian organik;

**3. Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan**

Program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan pantai Garut Selatan dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan.

**Kegiatan:**

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan melalui pembentukan pokmaswas
- Terlaksananya kegiatan operasional pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan di perairan pantai Garut selatan
- Meningkatnya kegiatan operasional penangkapan ikan melalui operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

**4. Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan laut, sarana dan prasarana perikanan tangkap, hasil produksi olahan, dan optimalisasi penggalan potensi sumberdaya perikanan laut.

**Kegiatan:**

- Peningkatan produksi ikan laut
- Peningkatan jumlah kapal dan alat tangkap
- Peningkatan produksi hasil olahan
- Penambahan kegiatan usaha nelayan kecil;
- Penambahan penggunaan sarana penangkapan ikan yang efektif berupa purse seine;
- Peningkatan produksi perikanan laut.

**5. Pembinaan Sumberdaya Peternakan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku peternak dalam menjalankan tata laksana serta adanya perubahan orientasi usaha dari skala pemenuhan keluarga menjadi skala usaha.

**Kegiatan:**

- Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Keterampilan (PSK) peternak dan aparatur peternakan;
- Peningkatan produktivitas kelompok peternak.

**6. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur pertanian dan masyarakat pertanian, dukungan perkantoran dan pendidikan formal di bidang pertanian, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian petani dalam pengelolaan usaha tani berorientasi agribisnis, meningkatkan pendapatan petani – nelayan kecil yang hidup dibawah garis kemiskinan, mengembangkan peran dan partisipasi kelembagaan petani-nelayan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, mengembangkan Profesionalisme Aparatur Penyuluh Pertanian, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan pertanian di tingkat lapangan, dan menjalankan dan memfungsikan kelembagaan di setiap subsistem usaha peternakan sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan.

**Kegiatan:**

- Pelaksanaan diklat teknis dan administrasi guna peningkatan SDM pertanian (aparatur dan petani).
- Pelaksanaan pemberdayaan (penataan) dan pembinaan kelembagaan tani pada berbagai kelompok, yakni penangkar benih pangan dan perkebunan, usahatani (produksi), jasa alsintan, Koptan, P3A Mitra Cai, SLPHT
- Peningkatan wawasan dan kemampuan petani melalui pengembangan teknologi, demplot dan

keikutsertaan dalam lomba kelompok serta bersifat partisipatoris.

- penyelenggaraan kegiatan Kursus Tani.
- Penyelenggaraan kegiatan penyebarluasan informasi teknologi usaha tani melalui media radio dan media cetak.
- Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Kader Pembangunan Pertanian bagi pemuda/pemudi tani, dan Pelatihan Penyuluh Pertanian Swakarsa (Petani Penyuluh).
- Penyelegaraan Bimbingan Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) yang dikelola petani.
- Penyelegaraan kegiatan Bimbingan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) secara berkelompok.
- Penyaluran bantuan kredit permodalan bagi pengembangan usaha petani kecil sumber APBD.
- Penyelegaraan kegiatan kelompok tani model percontohan.
- Penyelegaraan kegiatan Bimbingan Pengembangan/ Penguatan Kelompok KTNA Kabupaten dan Kecamatan melalui Mimbar Saresehan.
- Penyelegaraan Kegiatan Bimbingan Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- Penyelegaraan Kegiatan Perlombaan Kemampuan Tani.
- Penyelegaraan kegiatan BPP Model Percontohan.
- Penyelegaraan kegiatan penumbuhan pos pelayanan penyuluhan pertanian di tingkat desa.

## **7. Pengembangan Agribisnis**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis berbasis data empirik, agribisnis pada berbagai komoditi melalui pendekatan kawasan, kemitraan, peluang pasar dan potensi wilayah, industri hulu dan hilir bidang pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana pendukung agribisnis, agribisnis sayuran dan tanaman hias, agroindustri Sayuran, agribisnis Jeruk, agribisnis Manggis, agribisnis Pisang, meningkatkan Aksesibilitas STA,, menata kelembagaan Usaha Petani Sayuran dan Tanaman Hias, menata kelembagaan Usaha Petani buah-buahan dan Aneka Tanaman, dan menata kelembagaan Pemasaran Hortikultura.

### **Kegiatan:**

- Penyusunan data dan peta komoditi,
- penyusunan profil investasi dan promosi agro
- Perencanaan yang berorientasi lapangan dan kajian melalui rakor internal bidang pertanian dan perkebunan
- Informasi data dan peluang bisnis berbasis internet (web site)
- Pengembangan agribisnis pada 7 golongan komoditi (padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat (biofarmaka), tanaman tahunan perkebunan dan tanaman semusim perkebunan);
- Terselenggaranya infrastruktur agrowisata;
- Pengembangan pertanian terpadu.
- Pengembangan penangkaran benih padi, palawija, buah-buahan, sayuran, tanaman tahunan dan semusim perkebunan (minimal 10 kelembagaan

tani termasuk BBP padi, BBP palawija, BB hortikultura, pembenihan perkebunan);

- Pengembangan industri olahan/ industri (minimal 10 komoditi);
- Berkembangnya usaha penunjang/ jasa saprodi, alsintan dan agrowisata (minimal 10 kelompok termasuk STA).
- Tersedianya sarana prasarana yang layak dan up to date.
- Terlatihnya petani pada sentra-sentra pengembangan sayuran dan sentra pengembangan tanaman hias;
- Terbentuknya kawasan sentra sayuran dan tanaman hias.
- Terlatihnya kelompok pengelola agroindustri tomat.
- Tersedianya pengolahan pasta tomat, pengolahan pasta kering cabe, pengolahan keripik kentang.
- Agroexpo;
- Bantuan bibit;
- Pengadaan obat, pupuk;
- Pelatihan teknis petani.
- Agroexpo;
- Bantuan bibit;
- Pengadaan obat, pupuk;
- Pelatihan teknis petani.
- Terwujudnya jasa layanan petani plasma;
- Terwujudnya pengembangan divisi agroindustri.

## **8. Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan IPTEK**

Program ini bertujuan untuk mendirikan posyandu unggul, menyelenggarakan kerjasama Pemda Garut-Unicef; meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kesehatan,

pendidikan, perlindungan anak; dan peningkatan kapasitas masyarakat.

**Kegiatan:**

- Pemetaan air tanah di cekungan Garut;
- Rekomendasi lokasi pengembangan pelabuhan laut;
- Pencetakan 5 model posyandu unggul.

**9. Penyempurnaan dan pengembangan statistik**

Program ini bertujuan untuk penyusunan buku suseda, indikator makro, dan pelaksanaan Keppres 88 tahun 2004.

**Kegiatan:**

- Tersusunnya data penduduk berdasarkan klasifikasi sesuai kebutuhan perencanaan pemerintahan dan pembangunan.
- Terjalinnya koordinasi dengan instansi dan Dinas/ Lembaga terkait dalam pengembangan koneksi database kependudukan.

**10. Keluarga Berencana**

Program ini bertujuan untuk menyediakan data mikro untuk perencanaan kegiatan program baik sektor maupun lintas sektor, meningkatkan pencatatan dan pelaporan keluarga berencana.

**Kegiatan:**

- Penyediaan data basis/ mikro keluarga dengan tiga aspek program, antara lain: Data Demografi, Data Keluarga Berencana, dan Tahapan Keluarga Sejahtera;

- Mengevaluasi program KB secara komprehensif;
- Peningkatan peserta KB

**11. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam Momentum Hari Ulang Tahun TNI, Bhayangkara, Hari Kesatuan Gerak PKK; momentum Hari Keluarga Nasional dan Hari Kependudukan; koordinasi secara sinergis dalam Program P2WKSS

**Kegiatan:**

- Peningkatan peserta KB baru TNI, Bhayangkara, Kesatuan Gerak PKK
- Tersosialisasikannya 8 fungsi keluarga sebagai basis dalam pembinaan keluarga sejahtera oleh kelompok BKB, kelompok BKR dan kelompok BKL.
- Pemberian piagam dan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang berprestasi
- Terbentuknya Kelompok Bina Keluarga di Desa P2WKSS.
- Pelatihan bagi kader-kader kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS sebanyak 40 orang Kader.

**12. Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan bantuan dasar dan jaminan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, pejuang dan perintis kemerdekaan; usaha-usaha kesejahteraan sosial; kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi sosial masyarakat; Meningkatnya dan berkembangnya peran serta masyarakat maupun organisasi masyarakat dalam bidang sosial sehingga

Orsos dan Ormas dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam masyarakat; Meningkatnya upaya-upaya penanggulangan bencana mulai dari tanggap darurat, evakuasi sampai dengan pasca bencana sehingga dapat tertanggulangi secara menyeluruh dan terpadu.

**Kegiatan:**

- Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- Peningkatan usaha kesejahteraan sosial melalui kegiatan sosial dan organisasi masyarakat;
- Melibatkan peran serta masyarakat maupun organisasi masyarakat dalam bidang sosial sehingga Orsos dan Ormas dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam masyarakat.
- Pemberian pada masyarakat tidak mampu;
- Perbaikan dan penanggulangan bahaya bencana.

**13. Pengembangan pemberdayaan masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mewujudkan antisipasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

**Kegiatan:**

- Memelihara infrastruktur pedesaan jalan Desa yang dibangun oleh TMMD;
- Membangun infrastruktur Pedesaan jalan Desa lewat Kemanunggalan TNI dan Rakyat;
- Melaksanakan penganangan Bulan Bakti Gotong Royong;
- Menyenggarakan Kemah Bhakti Kesatuan Pemuda (KBKP);

**14. Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintahan desa; menertibkan Administrasi Tanah Kas Desa (TKD); dan melaksanakan penunjang kegiatan raksa desa.

**Kegiatan:**

- Penyediaan data Profil Desa/Kel
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan, Wilayah dan Tingkat Propinsi
- Realisasi bantuan pembangunan desa
- Pelaksanaan Pilkades sesuai peraturan yang berlaku
- Ops/ penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Desa
- Meningkatnya sarana desa yang baik
- penertiban administrasi Desa
- Kelancaran roda pemerintahan desa
- Revisi Perda

**15. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat**

Meningkatnya kinerja LPM, PKK, RW/RT dan Bumdes

**Kegiatan:**

- Diseminasi P3MD bagi kader KPD/KPM;
- Revitalisasi LPMD;

**16. Pemberdayaan Komunitas Pemukiman**

Penurunan kawasan kumuh di perkotaan dan perdesaan

**Kegiatan:**

- Rehab rumah kumuh
- Rehab drainase

- Pembangunan MCK

#### **17. Pembinaan dan Peningkatan Produksi Pertanian**

Meningkatnya produksi bahan mentah pertanian dan perkebunan rakyat guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendorong produk olahan (home industri); Meningkatkan optimalisasi lahan berbasis lingkungan dan penanganan lahan marjinal; Meningkatkan produksi ikan; Meningkatkan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR); Meningkatkan rata-rata konsumsi ikan perkapita/tahun; Meningkatkan produksi ikan di perairan umum; dan Berkembangnya mutu dan populasi ternak lebih merata dan tinggi produktivitasnya serta didukung oleh penguatan modal yang memadai

#### **Kegiatan:**

- Peningkatan produksi mentah: padi, jagung, kacang tanah, kedele, kacang hijau, ubikayu , ubijalar, sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan dan tanaman semusim perkebunan
- Pengkoordinasian intensifikasi pertanian dan perkebunan melalui perencanaan partisipatif di 42 kecamatan
- Peningkatan luasan areal tanam yang diusahakan berbasis lingkungan (organik);
- Peningkatan IP lahan marjinal;
- Penanganan lahan kritis pada lahan perkebunan/hutan rakyat.
- Peningkatan tata guna air.

## **18. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan, kebutuhan, keamanan pangan dan distribusi pangan melalui peningkatan kualitas produksi, Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Garut, Terlaksananya upaya diversifikasi pangan dan gizi, Terlaksananya upaya pengendalian OPT, Terjalannya hubungan sinergis antara para pelaku pembangunan peternakan yang disertai perbaikan tatalaksana dan mutu hasil, Intensifikasi lahan pekarangan melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Pengendalian OPT Utama pada komoditi hortikultura, dan Pengembangan jasa layanan saprotan pada wilayah sentra/ pengembangan hortikultura

### **Kegiatan:**

- Penyediaan produksi : padi, , kacang tanah, kedele, kacang hijau, ubikayu, ubijalar, sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan, dan tanaman semusim.
- Menumbuhkan dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan pola konsumsi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan ketersediaan, harga dan distribusi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan pangan 42 unit.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun percontohan KWT pada lokasi P2WKSS.
- Meningkatkan peranan wanita dalam pemenuhan gizi keluarga

- Tumbuh dan berkembangnya SLPHT pada berbagai jenis komoditi (padi, palawija, hortikultura dan perkebunan)
- Pembentukan KWT di lokasi P2WKSS masing-masing sebanyak;
- Pengadaan sarana produksi untuk lahan pekarangan masing-masing.
- Pembentukan kelompok pengelola pertanian organik;

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Terwujudnya kepercayaan diri, kemauan dan kemampuan serta taraf kehidupan sosial ekonomi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### **Kegiatan:**

- Bantuan bagi aAnak terlantar (AT), Lanjut Usia (LU), terlantar Penyandang Cacat (Paca), dan Wanita Tuna Susila (WTS).

### **2. Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan serta Koordinasi dan Jaringan Pengarusutamaan

#### **Kegiatan:**

- Pembentukan mulasi Pengarusutamaan Gender;
- Penyelenggaraan pelatihan partisipatif pembangunan masyarakat yang berwawasan Gender (P2MBG);

### **3. Keserasian Kebijakan Kependudukan**

Terbentuknya Nomenklatur Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai UU No. 32 tahun 2004, Tersedianya sistem dan Prosedur Pendaftaran Penduduk ( Permendagri No. 28 tahun 2005 ), dan Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Permendagri No. 28 tahun 2005).

**Kegiatan:**

- Penyediaan 3 ( tiga ) Perda baru: Tentang Pendaftaran Penduduk, Tentang spesifikasi penggunaan blangko, dan Tentang Retribusi pelayanan administrasi Penduduk dan Catatan Sipil.
- Pelaksanaan Pencatatan: Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengolahan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (tersedianya data bahan perencanaan ).

**4. Penataan Administrasi Kependudukan**

Terlaksananya Pendaftaran Penduduk (Permendagri No. 28 tahun 2005) dan terbentuknya Bank Data Tingkat Kabupaten Garut (Keppres 88 tahun 2004).

**Kegiatan:**

- Pencatatan data mengenai jumlah penduduk
- Pembentukan Tempat Perekaman data (TPDK)

**5. Pembinaan dan Peningkatan Produksi Pertanian**

Meningkatnya produksi bahan mentah pertanian dan perkebunan rakyat guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendorong produk olahan (home industri); Meningkatkan optimalisasi lahan berbasis lingkungan dan penanganan lahan marjinal; Meningkatkan produksi ikan; Meningkatkan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR);

Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan perkapita/tahun;  
Meningkatnya produksi ikan di perairan umum; dan  
Berkembangnya mutu dan populasi ternak lebih merata  
dan tinggi produktivitasnya serta didukung oleh penguatan  
modal yang memadai

**Kegiatan:**

- Peningkatan produksi mentah: padi, jagung, kacang tanah, kedele, kacang hijau, ubikayu , ubijalar, sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan dan tanaman semusim perkebunan
- Pengkoordinasian intensifikasi pertanian dan perkebunan melalui perencanaan partisipatif di 42 kecamatan
- Peningkatan luasan areal tanam yang diusahakan berbasis lingkungan (organik);
- Peningkatan IP lahan marjinal;
- Penanganan lahan kritis pada lahan perkebunan/hutan rakyat.
- Peningkatan tata guna air.

**6. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan, kebutuhan, keamanan pangan dan distribusi pangan melalui peningkatan kualitas produksi, Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Garut, Terlaksananya upaya diversifikasi pangan dan gizi, Terlaksananya upaya pengendalian OPT, Terjalannya hubungan sinergis antara para pelaku pembangunan peternakan yang disertai perbaikan tatalaksana dan mutu hasil, Intensifikasi lahan pekarangan melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Pengendalian OPT Utama pada komoditi hortikultura, dan

Pengembangan jasa layanan saprotan pada wilayah sentra/ pengembangan hortikultura

**Kegiatan:**

- Penyediaan produksi : padi, , kacang tanah, kedele, kacang hijau, ubikayu, ubijalar, sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan, dan tanaman semusim.
- Menumbuhkan dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan pola konsumsi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan ketersediaan, harga dan distribusi pangan.
- Menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan pangan 42 unit.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun percontohan KWT pada lokasi P2WKSS.
- Meningkatkan peranan wanita dalam pemenuhan gizi keluarga
- Tumbuh dan berkembangnya SLPHT pada berbagai jenis komoditi (padi, palawija, hortikultura dan perkebunan)
- Pembentukan KWT di lokasi P2WKSS masing-masing sebanyak;
- Pengadaan sarana produksi untuk lahan pekarangan masing-masing.
- Pembentukan kelompok pengelola pertanian organik;

### **3.4.5 Menciptakan Atau Meningkatkan Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Memacu Kewirausahaan**

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,32% dari total angkatan kerja, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah manusia yang alami. Ekspresi diri diwujudkan dalam bekerja. Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Karena itu Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok dalam Agenda pembangunan yang dijabarkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur yang pada umumnya bekerja disektor pertanian dengan mengisi kesempatan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan produktif mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 berjumlah 2.173.623 jiwa, dan pada tahun 2004 telah mencapai 2.204.175 jiwa. Seiring dengan besarnya jumlah penduduk tersebut bertambah pula kompleksitas dan besarnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), antara lain ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, ketunasosialan, bencana alam dan sosial (Konflik Sosial). Dukungan terhadap lanjut usia, baik berasal dari keluarga maupun masyarakat masih rendah. Dari jumlah penduduk tersebut pada tahun 2003 terdapat jumlah penduduk miskin sebesar 338.702 jiwa dan tahun 2004 menurun menjadi 332.750 jiwa. Selanjutnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Fakir Miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan. Dengan masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya para Penyandang Cacat masih banyak menghadapi kendala untuk mencapai kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain

akses kepelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, serta kepentingan yang terbaik bagi anak. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender, serta berbagai eksploitasi perempuan dan anak serta tingginya tindak kekerasan dengan korban pada perempuan dan anak.

#### **A. SASARAN**

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2009, adalah:

##### **1. Penciptaan atau Peningkatan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja**

1. Terwujudnya tenaga kerja yang disiplin dan inovatif baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar kerja;
2. Terwujudnya kemampuan dan produktifitas yang tinggi para transmigran yang terintegrasi dengan masyarakat sekitarnya;
3. Tercapainya kerjasama antar daerah dan pemberangkatan calon transmigrasi
4. Terciptanya jiwa wirausaha baru dan tenaga kerja terampil yang siap pakai sesuai dengan kejuruan, serta meningkatnya kualitas instruktur Balai Latihan Kerja (BLK);
5. Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) setiap tahun, terlaksananya kesepakatan antara pekerja dan

pengusaha dalam berbagai perselisihan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
7. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
8. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

## **2. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan social terhadap pelayanan sosial dasar;
2. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
4. Terpenuhinya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);
6. Meningkatnya mutu profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

## **3. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Terjaminnya keadilan gender khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi kaum perempuan ;
2. Tersusunnya profil gender dan data base tentang tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan ;
3. Meningkatnya perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan di bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, sosial budaya dan politik;

4. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan ;
5. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat pada setiap Kabupaten dan Kota di Garut ;
6. Terbentuknya kelembagaan dan jaringan di daerah terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan .
7. Terhapusnya bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
8. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak ;
10. Tersusunnya profil dan data base tentang perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
11. Terbentuknya kelembagaan dan jaringan di daerah terutama yang menangani masalah-masalah hak-hak anak.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

### **1. Penciptaan atau Peningkatan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja**

1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.

2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan ketrampilan yang berbasis kompetensi serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
7. Peningkatan fungsi Lembaga Bipartit dan Tripartit

## **2. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kepedulian dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan social lainnya ;
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;

4. Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
6. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
7. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;
8. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan ;
9. Membangun aspirasi terhadap penduduk, terhadap lanjut usia, keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

**3. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
3. Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan ;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak ;

6. Memperkuat kelembagaan, pemberdayaan perempuan baik di propinsi maupun di Kabupaten/Kota, untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberdayaan perempuan, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

#### **1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun di perkotaan. Program ini diarahkan pada :

##### **Kegiatan:**

- Pemberian Kerja Sementara (PKS);
- Pengembangan wira usaha baru
- Peningkatan pengiriman tenaga kerja terampil keluar negeri
- Pengiriman transmigrasi keluar pulau jawa
- Kerjasama Antar Daerah (KSAD) melalui MOU

**2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Program ini diarahkan pada :

**Kegiatan:**

- Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

**3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja. Program ini diarahkan pada :

**Kegiatan:**

- Peningkatan, pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Penguatan kapasitas kelembagaan ketenagakerjaan.

**4. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini diarahkan pada :

**Kegiatan:**

- Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;
- Pemberdayaan perempuan penyandang masalah rawan social ekonomi ;
- Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM
- Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan lainnya ;

**5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Program ini diarahkan pada :

**Kegiatan:**

- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial ;

- Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial.
- Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS;
- Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA ;
- Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

#### **6. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan program ini untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, serta memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Program ini diarahkan pada:

##### **Kegiatan:**

- Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan lainnya;
- Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial ;
- Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan lainnya ;
- Pemberdayaan Satgas Penanggulangan Bencana.

**7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan kesejahteraan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan serta melindunginya dari terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Program ini diarahkan pada:

**Kegiatan:**

- Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi;
- Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- Penyusunan profil gender dan data base tentang tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan terhadap perempuan dan anak;
- Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi;

**8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Program ini diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota di Garut.

**Kegiatan:**

- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Ppropinsi dan Kabupaten/ Kota.
- Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di Propinsi dan Kab/ Kota.

**9. Program Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Tujuan program ini adalah penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang berbasis gender. Program ini diarahkan pada:

**Kegiatan:**

- Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- Pembentukan dan memfasilitasi lembaga layanan korban kekerasan.

**II. PROGRAM PENUNJANG**

**1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan social masyarakat (TKSM)/ relawan sosial, dan dunia usaha. Program ini pada :

**Kegiatan:**

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM / relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal) ;
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS ;
- Pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan ;
- Pengawasan pelaksanaan pengumpulan uang, barang dan undian berhadiah.

**2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak.**

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perempuan dan anak, di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

**Kegiatan:**

- Penyusunan kebijakan untuk penguatan kelembagaan PUG dan PUA di Propinsi dan Kab/ Kota;
- Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan tentang perempuan dan anak.
- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

### **3.4.6 Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas**

Pembangunan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan langkah strategis karena memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan KUMKM yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi - sosial penduduk Garut. Peran KUMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusi KUMKM terhadap pembentukan PDRB Garut dan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja. Dalam masa krisis, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) telah memperlihatkan ketangguhannya dalam menghadapi gejolak ekonomi makro. Skala usaha tersebut bahkan mampu tumbuh dengan tingkat yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan kepada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi pilar salah satu utama dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini disebabkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan jumlah pelaku ekonomi terbesar dan tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan KUMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

#### **A. SASARAN**

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis dalam upaya mempercepat peningkatan taraf hidup rakyat. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan

dapat berperan aktif dalam meningkatkan posisi tawar, efisiensi usaha, dan daya saing sebagai dampak eksternalitas positif dari pasar bebas . Sedangkan UMKM diharapkan dapat berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tiga tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya Iklim Usaha yang Lebih Kondusif bagi Pengembangan Usaha dan Investasi;
2. Meningkatnya proporsi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil formal;
3. Meningkatnya laju nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah;
4. Berfungsinya sistem lembaga pendidikan untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi;

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan permasalahan umum yang dihadapi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta memperhatikan permasalahan pokok pembangunan di Garut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah ke depan adalah:

1. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender;

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja;
4. Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.
5. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

#### **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN.**

Berdasarkan permasalahan dan arah kebijakan tersebut, maka program-program dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan diimplementasikan adalah sebagai berikut :

##### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

###### **1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing KUKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktifitas meningkat, jumlah wirausaha baru yang professional dan mandiri meningkat serta ragam produk-produk KUKM berkembang secara signifikan. Program ini diarahkan pada:

###### **Kegiatan:**

- Peningkatan kemampuan pengelolaan usaha IKM.
- Peningkatan kemitraan usaha pelaku IKM;
- Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis.

## **2. Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala mikro di sector informal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban dari PHK. Disisi lain program ini juga diarahkan untuk peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha yang akan pada:

### **Kegiatan:**

- Pemberdayaan Usaha Produktif Berskala Mikro;
- Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro.
- Pengembangan pemasaran usaha mikro.

## **3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM**

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal untuk mengembangkan usaha KUMKM serta penyesuaian skala usaha yang dimilikinya agar lebih efisien. Sistem pendukung usaha bagi KUMKM dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang luas, berkualitas dan mudah dijangkau sehingga dapat meningkatkan akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya

manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, serta mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga keuangan bagi pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program ini akan dikembangkan Pada:

**Kegiatan :**

- Tugas Pembantuan, Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Perlengkapan Organisasi Koperasi;
- Pelatihan Aplikasi Teknologi Motivasi bagi UKM dan BMT
- Peningkatan Peranan Wanita Koperasi (P2WKOP)
- Pelatihan Dasar-dasar Akuntansi Koperasi
- Pelatihan Peningkatan Kualitas anggota Koperasi
- Pelatihan Akuntansi Komputer
- Pelatihan Manajerial organisasi koperasi bagi manajer koperasi
- Pelatihan kewirausahaan bagi karyawan dan pengelola koperasi
- Peningkatan produktivitas koperasi susu

**4. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha ekonomi yang efisien, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan perkembangan dan peningkatan kinerja usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat mengurangi beban administrative dan hambatan usaha serta dapat meningkatkan rata-rata skala usaha dan mutu layanan perijinan/pendirian usaha, serta mendorong partisipasi stakeholders. Program ini terutama akan dilaksanakan seluruh wilayah Garut.

**Kegiatan :**

- Hari Koperasi
- Monitoring dan evaluasi kredit KUKM dan BMT
- Pelatihan kewirausahaan (CEPE) bagi UKM dan BMT
- Peningkatan kapasitas penanganan pemantauan pembangunan KUKM dan BMT
- Pendataan potensi koperasi
- Penyusunan jaringan kerja pemasaran
- Temu usaha dan kemitraan
- Pameran dan promosi KUKM
- Sosialisasi program pengembangan pola ekonomi syariah
- Rencana tindak kemitraan pengembangan ekonomi lokal (KPEL) di Kabupaten Garut
- Identifikasi peranan usaha kecil menengah (UKM) dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Garut
- Pengembangan situ web site koperasi, UKM, BMT dan pasar
- Pembuatan profil perusahaan
- Penyusunan sistem informasi KUKM dan BMT
- Penilaian klasifikasi koperasi dan penilaian kesehatan KSP USP
- Pendataan potensi UKM

**5. Pemberdayaan Usaha Mikro**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya, serta menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian

diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat. Program ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Garut.

**Kegiatan :**

- Pendataan usaha mikro di Kabupaten Garut

**6. Pengembangan Perlindungan Konsumen**

**Kegiatan :**

- Pemberdayaan dan pemeriksaan peredaran garam beryodium di pasar dan produsen
- Pengembangan sistem informasi pasar
- Sosialisasi UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 2/1981 tentang meteorologi legal

**7. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri**

**Kegiatan :**

- Pemberdayaan Dekranasda dan pemasaran produk Kabupaten Garut
- Dana pendamping pemantauan distribusi beras raskin
- Pengadaan sarana promosi produk
- Peningkatan promosi produk unggulan Kabupaten garut

- Pengkajian dan penyusunan pedoman teknis pengelolaan pasar dalam rangka penyesuaian tarif
- Intensifikasi pendataan retribusi di 12 pasar se Kabupaten Garut
- Penataan lingkungan pasar
- Manajemen proyek penataan lingkungan pasar
- Peningkatan kemampuan petugas keamanan, kebersihan dan keindahan

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Strategi**

#### **Kegiatan :**

- Diklat peningkatan teknik produksi IKM
- Revitalisasi mesin bantuan dan pengadaan peralatan/mesin produksi
- Kajian identifikasi kluster industri di Kabupaten Garut
- Peningkatan keanekaragaman produk

### **2. Pengembangan Standarisasi Nasional**

#### **Kegiatan :**

- Sosialisasi dan sertifikasi HAKI
- Penerapan standarisasi produk industri dan gugus kendali mutu (GKM)

### **3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

#### **Kegiatan :**

- Gelar teknologi tepat guna (TTG)

#### **4. Peningkatan Daya Saing dan Investasi**

**Kegiatan :**

- Optimalisasi sistem informasi penanaman modal
- Promosi investasi
- Temu investor

#### **5. Pengembangan Prasarana Pariwisata**

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat serta memperkuat jaringan kelembagaan. Program ini pada :

**Kegiatan :**

- Penataan objek wisata alam arung jeram Pakenjeng;
- Manajemen penataan objek wisata alam arung jeram Pakenjeng;
- Bursa pasar wisata;
- Penataan sarana dan prasarana pariwisata Tourist Information Centre (TIC);
- Penyelenggaraan event pariwisata;
- Pemilihan mojang jajaka
- Peningkatan kualitas objek dan daerah tujuan wisata;
- Manajemen proyek peningkatan kualitas objek dan daerah tujuan wisata;
- Pembuatan petunjuk objek daerah tujuan wisata;
- Penataan objek dan daya tarik wisata budaya
- Manajemen proyek penataan objek dan daya tarik wisata;

- Pengadaan material promosi

## **6. Pengembangan Nilai Budaya**

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif berbasis budaya dan mendorong investasi. Program ini direncanakan mengarah pada :

### **Kegiatan :**

- Peningkatan dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan;
- Review rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- Inventarisasi dan dokumentasi sejarah lokal dan nilai tradisional;
- Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisi kesundaan;
- Pembinaan juru pelihara dan juru kunci peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

## **7. Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah**

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (Pusat-propinsi dan Kabupaten), swasta dan masyarakat dan pelaku industri budaya dan pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya manusia, dan kelembagaan Program ini direncanakan mengarah pada :

### **Kegiatan :**

- Pangelaran/Pameran/Helaran seni budaya;
- Pasang giri/Vestival seni budaya;

- Pengadaan peralatan kesenian;
- Manajemen proyek pengadaan peralatan kesenian.

### **3.4.7 Mempertahankan Dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan**

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.

#### **Perumahan dan Permukiman**

Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan perumahan dan permukiman. Pemenuhan kebutuhan rumah antara lain dilakukan oleh masyarakat antara lain dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri yaitu berkisar antara 70-80 persen dan lainnya oleh Perumnas, REI dan swasta lainnya. Namun demikian. Selain terbatasnya ketersediaan rumah, semakin meluasnya kawasan kumuh juga merupakan permasalahan perumahan dan permukiman yang perlu mendapatkan perhatian. Tumbuhnya permukiman kumuh antara lain disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang terkait dengan prasarana dan sarana dasar permukiman. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) yang telah dilakukan telah mengalami banyak kemajuan, namun demikian cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai.

Pada akhir tahun 2004 tingkat pelayanan air bersih perpipaan Garut di kawasan perkotaan baru mencapai 38 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 5,5 persen. Untuk prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar cakupannya telah mencapai 85,7 % persen untuk perkotaan dan 47,4 % untuk perdesaan. Sedangkan tingkat pengelolaan persampahan mencapai 74 % dan luas daerah genangan mencapai sekitar 43.951,12 ha. Pembangunan yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan meskipun ternyata belum menunjukkan perkembangan yang merata. Gambaran kondisi seperti ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Garut masih terjadi disparitas wilayah khususnya terkait dengan masih terkonsentrasi beberapa aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu (terjadi aglomerasi), tidak selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, terhambatnya pembangunan infrastruktur akibat krisis yang berkepanjangan. Selain itu dengan adanya penerapan Otonomi Daerah, masing Kabupaten/Kota bergairah untuk pengembangan wilayah masing-masing tanpa melihat konteks kepentingan regional dan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

#### **A. SASARAN.**

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, maka sasaran Mempertahankan dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan sampai dengan tahun 2009 adalah:

##### **1. Kebijakan Mempertahankan, Memanfaatkan SDA dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan**

1. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Terkendalinya potensi konflik air;
3. Terkendalinya pemanfaatan air tanah;
4. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
5. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;

6. Terkendalinya pencemaran air;
7. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis;
8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi;
10. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
11. Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan
12. Pulihnya kondisi sumber-sumber air, sarana dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan.

## **2. Perumahan dan Permukiman**

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat Garut akan hunian yang layak dan sehat.;
2. Terwujudnya keterlibatan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran dan pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru;
4. Tercapainya penurunan luasan kawasan kumuh;
5. Tercapainya peningkatan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan peningkatan kinerja pengeloaan/pembangunan gedung negara;
6. Terwujudnya pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
7. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan;
8. Tercapainya penurunan kebocoran air minum;
9. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum;

10. Tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
11. Terwujudnya sistem air limbah terpusat dengan pemanfaatan instalasi pengolah limbah di perkotaan;
12. Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan;
13. Meningkatnya akses sanitasi dasar;
14. Meningkatnya volume sampah terangkut di kawasan perkotaan serta meningkatnya kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan (environmental friendly);
15. Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan;
16. Tercapainya peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sampah;
17. Tercapainya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
18. Tercapainya kinerja dan SDM aparat pengelola sampah dan drainase;
19. Tercapainya fungsi saluran drainase sebagai patus air hujan sehingga dapat mengurangi luasan daerah genangan;
20. Terkendalinya pertumbuhan kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang nyaman dan efisien dalam pengelolaan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
21. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan yang sinergis dan saling menguntungkan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dalam Mempertahankan dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah:

### **1. Kebijakan Mempertahankan, Memanfaatkan SDA dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan**

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Ke depan upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Pengembangan dan penerapan system conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan. Upaya yang terlalu menitikberatkan pada sisi penyediaan (supply) terbukti kurang efisien dan efektif dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan sumber daya air.

Untuk itu, upaya tersebut perlu disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi

sumber-sumber air adalah hal yang sangat perlu dilakukan karena penting dan tak-tergantikannya fungsi vegetatif dalam konteks lingkungan. Namun disadari bahwa hasil dari upaya vegetatif tersebut bersifat jangka panjang. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan upaya vegetatif perlu diimbangi upaya-upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih bersifat quick yielding.

Pembangunan tampungan air berskala kecil akan lebih dikedepankan, sedangkan pembangunan tampungan air dalam skala besar perlu pertimbangan yang lebih hati-hati karena menghadapi masalah yang lebih kompleks, terutama terkait dengan isu sosial dan lingkungan. Pola pembangunan berskala kecil ini akan mengurangi derajat konsentrasi biaya dan resiko pada suatu areal dan penduduk tertentu. Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tapi juga diarahkan untuk memelihara kualitas air. Selain itu, upaya konservasi air tanah terus akan ditingkatkan dengan pengisian kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau dengan aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak.

Untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir, maka perlu dilakukan pelestarian situ-situ dan pengamanan daerah aliran sungai. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada tiga tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di daerah lumbung padi. Upaya rehabilitasi akan diprioritaskan pada areal irigasi di daerah lumbung padi.

Mengingat luasnya jaringan irigasi yang belum optimal fungsinya, maka pada tiga tahun ke depan tidak perlu lagi dilakukan upaya pengembangan jaringan sawah beririgasi baru, kecuali menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dimulai dan tengah dikerjakan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan.

Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.

Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Lembaga dewan sumber daya air dan komisi irigasi

akan dibentuk dan diperkuat, yang ditujukan selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat. Walaupun domain kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten telah ditetapkan, upaya kerjasama kemitraan antar ketiga tingkatan pemerintah tersebut akan terus didorong agar keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai dapat dijamin. Dalam upaya memperkuat civil society, keterlibatan masyarakat, BUMD dan swasta perlu terus didorong. Terkait dengan hal tersebut dalam tiga tahun ke depan, akan diselesaikan penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, terutama dalam hal mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. Pengembangan modal sosial akan dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local wisdom) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat Garut. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air perlu didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu, penataan dan penguatan system pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Potensi pemerintah daerah, pengelola, dan pemakai sumber daya air perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pemulihan pelayanan sumber daya air yang rusak akibat bencana alam

dilakukan secara darurat dengan memprioritaskan pada penyediaan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air permukaan, dan pengendalian banjir dengan pendekatan flood management. Selanjutnya, akan dilakukan upaya mengembalikan fungsi secara permanen terhadap bangunan-bangunan pengairan, memfungsikan kembali jaringan irigasi, dan mengamankan pantai dari kerusakan akibat erosi dan sedimentasi dengan lebih mengutamakan pendekatan vegetatif.

## **2. Perumahan dan Permukiman**

1. Mendukung Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua stakeholders;
2. Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat;
3. Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran;
4. Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman;
5. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan;
6. Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum;
7. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum;
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan;
9. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;

10. Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta;
11. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat di perkotaan;
12. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan;
13. Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta;
14. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS);
15. Meningkatkan kinerja pengelola sampah dan drainase;
16. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan;
17. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam mencapai sasaran pembangunan drainase guna pengendalian banjir.

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Untuk mencapai sasaran umum dan melaksanakan kebijakan di atas dilakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam :

### **I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

#### **I.1 Kebijakan Mempertahankan, Memanfaatkan SDA dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan**

##### **1. Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Air Lainnya**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan

keterpaduan pengelolaan, serta menjamin kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; dan eksploitasi air tanah yang terkendali.

**Kegiatan :**

- Eksploirasi/ pemeliharaan sunagi
- Manajemen eksploirasi/pemeliharaan sungai
- Perlindungan sumber mata air
- Manajemen perlindungan sumber mata air
- Pengukuran dan perencanaan DI. Cikandang/Leuwikanjut
- Rehabilitasi struktur jaringan drainase wilayah perkotaan
- Manajemen proyek rehabilitasi struktur jaringan drainase wilayah perkotaan
- Eksploitasi/ pemeliharaaagn sungai wilayah perkotaan
- Manajemen proyek eksploitasi/ pemeliharaaagn sungai wilayah perkotaan
- Penatagunaan sumber daya air;
- Menyelenggarakan konservasi air tanah pada wilayah kritis air;
- Melakukan studi penelitian, kajian, dan lain-lain dalam rangka pengelolaan sumberdaya air
- Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air;
- Pengembangan teknologi tepat guna;
- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

## **2. Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral**

### **Kegiatan :**

- Pengelolaan informasi pertambangan mineral logam dan non logam

## **3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase**

### **Kegiatan :**

- Pembuatan bronjong kawat penataan sampah
- Manajemen proyek pembuatan bronjong kawat penataan sampah
- Rehabilitasi pagar masjid agung Garut
- Manajemen proyek rehabilitasi pagar masjid agung Garut
- Manajemen proyek pembangunan drainase leachet
- Pembangunan drainase leachet
- Rehabilitasi taman kota (Blumbak)
- Pembuatan 66 buah TPS
- Manajemen proyek pembuatan 66 buah TPS
- Pembuatan prasarana dan sarana penunjang TPA Pasir Bajing
- Manajemen proyek pembuatan prasarana dan sarana penunjang TPA Pasir Bajing
- Pengadaan 75 unit roda sampah
- Penataan alun-alun Tarogong kaler
- Manajemen proyek penataan alun-alun Tarogong kaler

- Manajemen proyek pengadaan 75 unit roda sampah
- Pengadaan 300 unit tong sampah
- Manajemen proyek pengadaan 300 unit tong sampah

#### **4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini ditujukan untuk mengurangi tingkat risiko dan periode genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya.

##### **Kegiatan :**

- Biaya swakelola operasional dan pemeliharaan (PAL I, II dan III – Regol dan Suci)
- Penanggulangan pemanfaatan kotoran ternak sapi menjadi biogas
- Manajemen proyek penanggulangan pemanfaatan kotoran ternak sapi menjadi biogas
- Pembangunan WC Sekolah
- Manajemen proyek pembangunan WC Sekolah
- Pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan K3
- Manajemen proyek pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan K3
- Dana Alokasi Khusus
- Pendamping Dana Alokasi Khusus
- Manajemen proyek Dana Alokasi Khusus
- Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai di seluruh Daerah Aliran Sungai;

- Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai;
- Melakukan studi penelitian, kajian, dan lain-lain dalam rangka pengendalian banjir;
- Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir;
- Melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada penanaman tanaman bakau pada daerah pantai.

## **5. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

### **Kegiatan :**

- Penertiban peredaran hasil hutan
- Peningkatan pelayanan tata usaha kayu rakyat
- Evaluasi dan laporan status lingkungan
- Manajemen proyek evaluasi dan laporan status lingkungan
- Penanaman hutan pantai

## **6. Pengembangan dan Pembinaan Kehutanan**

### **Kegiatan :**

- Pembinaan pengembangan produksi benih/ bibit tanaman hutan rakyat
- Pengembangan aneka usaha budidaya kehutanan
- Pengembangan produksi arang kompos
- Penanaman pohon di kanan kiri jalan Kota Garut

## **I.2 Perumahan dan Permukiman**

### **1. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar kawasan perumahan, pemberdayaan dan peningkatan kinerja pasar primer perumahan; pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang.

#### **Kegiatan :**

- Standarisasi penyediaan infrastruktur perumahan;
- Penyediaan rumah sederhana sehat dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman.
- Pembinaan teknologi pengelolaan dan pembangunan gedung negara serta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan norma standar pedoman manual (NSPM).
- Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam;
- Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan sarana permukiman.
- Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar.
- Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga;

## **2. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

### **Kegiatan:**

- Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan perdesaan meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi;
- Pendataan dan identikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/ kota;
- Pemulihan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada lokasi bencana alam.
- Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran;
- Revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan;
- Pembangunan sarana sanitasi (jamban keluarga/ komunal) di perdesaaan;

## **3. Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan Dan Drainase**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, berkurangnya luasan wilayah tergenang, meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta meningkatnya kinerja pengelola persampahan dan drainase.

### **Kegiatan:**

- Peningkatan kualitas pengelolaan sampah yang meliputi pengolahan dan pembuangan akhir;

- Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas Kabupaten serta menunjang pengendalian banjir di perkotaan.
- Revitalisasi dan peningkatan operasional TPA;
- Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan sampah;

## **II. PROGRAM PENUNJANG :**

### **II.1 Kebijakan Mempertahankan, Memanfaatkan SDA dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan**

#### **1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Cadangan Sumber Daya Alam**

##### **Kegiatan :**

- Penunjang program gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK) Jawa Barat
- Pemeliharaan tanaman rami dalam rangka PHBM Tahun I

#### **2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

##### **Kegiatan :**

- Perlindungan hutan dan pembinaan SDM

#### **3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

##### **Kegiatan :**

- Budidaya tanaman kopi dalam rangka PHBM

**4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya.**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat, dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi.

**Kegiatan:**

- Peningkatan optimalisasi jaringan irigasi yang belum optimal berfungsi;
- Rehabilitasi jaringan irigasi terutama pada daerah penghasil pangan;
- Pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang tersebar di Garut;
- Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam.
- Melakukan studi penelitian, kajian, dan lain-lain dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi
- Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi;
- Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang telah dikembangkan.
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

**5. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, permukiman, dan industri dengan prioritas

untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga, permukiman, dan industri dapat terkendali.

**Kegiatan:**

- Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya;
- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal;
- Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal.
- Melakukan studi penelitian, kajian, dan lain-lain dalam rangka peningkatan sumberdaya air;
- Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi;
- Pembangunan prasarana air baku dengan pemanfaatan air tanah perlu dibatasi dan diprioritaskan pada daerah yang kekeringan, karena eksploitasi yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan lingkungan (penurunan muka air tanah, intrusi air laut dan lain-lain).

## **II.2 Perumahan dan Permukiman**

### **1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan

berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

**Kegiatan:**

- Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh;
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Fasilitasi kerjasama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan;
- Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah.

**2. Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah**

Program ini ditujukan untuk melakukan penataan kembali kelembagaan yang terkait dengan pembangunan air minum dan air limbah serta mewujudkan sistem kelembagaan dan tata laksana pembangunan air minum dan air limbah yang efektif.

**Kegiatan:**

- Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM serta pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM dan instansi pengelola air limbah;
- Fasilitasi pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah yang berbasis kelompok masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta;

### **3. Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan Dan Drainase**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antarwilayah dalam penanganan persampahan secara terpadu dan drainase.

#### **Kegiatan:**

- Melakukan kerjasama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota besar dan Metropolitan;
- Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan sampah dan drainase.
- Melakukan kerjasama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep bussines plan;
- Melakukan pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berbasis masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi PHBS;

#### **3.4.8 Agenda Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM**

Dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM, prioritas pembangunan diletakkan pada :

##### **3.4.8.1 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok**

Rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok serta golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Peristiwa pertikaian dan konflik antar golongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan Tanah Air merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, maka rasa saling percaya dan

harmoni antar kelompok harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik tersebut perlu untuk ditangani dan diselesaikan segera.

#### **A. SASARAN**

Sasaran dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat adalah:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar elite, antar kelompok masyarakat atau antar golongan di daerah-daerah rawan konflik;
2. Terpeliharanya situasi aman dan damai;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.
4. Terbangunnya sistem deteksi dini dalam mengantisipasi konflik.
5. Terpetakannya daerah rawan konflik.

#### **B. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat adalah :

1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial, sebagai bagian penting dari upaya membangun masyarakat sipil yang kokoh;
2. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi yang berkelanjutan;
3. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel serta adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat;

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan dalam Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

### **I. PROGRAM UTAMA**

#### **1. Program Pemulihan Konflik**

Program ini bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur sosial politik, serta memulihkan kondisi mental masyarakat di daerahdaerah yang dilanda konflik.

##### **Kegiatan :**

- Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik.
- Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah konflik.
- Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik ;

#### **2. Program Peningkatan Komitmen Persatuan Dan Kesatuan Nasional**

Program ini bertujuan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan dan kesatuan nasional dalam konstelasi kehidupan kebangsaan yang dinamis dan menciptakan harmonisasi hubungan antar unit sosial kemasyarakatan. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

##### **Kegiatan:**

- Fasilitasi proses rekonsiliasi elite masyarakat maupun pemerintahan.

- Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana persatuan bangsa;
- Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas;
- Fasilitasi terlaksananya edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik;

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Program Penataan Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

#### **Kegiatan :**

- Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan;
- Fasilitasi Pemberdayaan dan pemberian peluang organisasi kemasyarakatan dalam proses pengambilan serta implementasi keputusan publik;
- Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya.

#### **3.4.8.2 Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai Nilai Luhur.**

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut,

pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Konsepsi pengembangan budaya sendiri berangkat dari terminologi budaya yang berangkat dari 2 sifat dasar, pertama, budaya yang bersifat statis dan kedua, budaya yang bersifat dinamis. Untuk budaya yang bersifat statis, cenderung ditinggalkan oleh perkembangan jaman. Sementara untuk budaya yang bersifat dinamis, mudah untuk melakukan penyesuaian sehingga akan selalu dapat mengikuti perkembangan jaman. Elastisitas budaya inilah yang menjadi dasar sehingga masih banyak budaya yang dapat berkembang sesuai dengan jaman yang ada. Dalam masyarakat yang mempunyai budaya kuat, akan mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan membangun masa depan yang lebih baik. Masyarakat yang budayanya lemah, tidak mampu membangun konsensus untuk memecahkan masalahnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan keseimbangan antara pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial, perlu lebih ditingkatkan olah rasa disamping olah pikir dan olah raga yang berbasiskan pada nilai-nilai budaya lokal.

#### **A. SASARAN**

Sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah:

1. Berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan;
2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya; dan
3. Meningkatnya kesempatan untuk pengembangan ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan

pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi budaya sekaligus mengembangkan dan melindungi potensi tersebut.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah:

1. Reaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial;
2. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah;
3. Berkembangnya potensi ekonomi lokal yang berbasis pengembangan budaya.

## **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan dalam Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur dijabarkan dalam program-program sebagai berikut:

### **I. PROGRAM UTAMA**

#### **1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya**

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya daerah. Tujuan tersebut dicapai antara lain melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional dengan memanfaatkan potensi budaya lokal sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggungjawab. Tujuan tersebut dilaksanakan pula melalui pengarusutamaan nilai-nilai

budaya pada setiap aspek pembangunan. Program ini diarahkan ke Kabupaten/Kota se Garut.

**Kegiatan:**

- Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal
- Revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur
- Transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa.

**II. PROGRAM PENUNJANG**

**1. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).

**Kegiatan :**

- Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan, dan benda cagar budaya;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya.
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya;
- Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.

### **3.4.8.3 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Penanggulangan Kriminalitas.**

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Garut memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya terorisme. Gangguan terhadap kemanan, ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat khususnya nelayan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban di Garut tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

#### **A. SASARAN**

Sasaran dari Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman masyarakat;
2. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama penyalur narkoba dan prekursor;
3. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

#### **B. ARAH KEBIJAKAN**

Sasaran tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
2. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur organisasi Satpol PP;
4. Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;
5. Peningkatan pengamanan asset-asset pemerintah daerah.

### **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Arah kebijakan dalam Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM UTAMA**

##### **1. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Kriminal**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat serta pemberantasan tindak kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

**Kegiatan:**

- Pengembangan deteksi dini untuk pencegahan kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat.
- Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan maupun pendidikan dan pelatihan.
- Fasilitasi action formal penanggulangan narkoba.
- Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
- Evakuasi dan rehabilitasi korban bencana alam dan pengungsi.

**II. PROGRAM PENUNJANG****1. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dalam Pemberdayaan Potensi Keamanan**

Program ini ditujukan untuk mengembangkan SDM yang memadai dan mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

**Kegiatan :**

- Kerja sama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dan penyidik pegawai negeri sipil dengan pihak TNI/Polri dan Kejaksaan;
- Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
- Peningkatan profesionalisme aparat dalam penegakan perda, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam.
- Pemberian bimbingan dan penyuluhan trantibum, khususnya di daerah rawan.

#### **3.4.8.4 Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upayaupaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di samping terbaikannya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

##### **A. SASARAN**

Untuk mendukung pembangunan hukum dan HAM, sasaran yang akan dilakukan adalah:

1. Terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi;
3. Kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan;
4. Terkoordinasinya dan terhamonisasinya pelaksanaan produk hukum yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif warga.

#### **B. ARAH KEBIJAKAN**

Pembangunan Hukum dan HAM dalam tiga tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya :

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat sebagai bagian dari upaya pembaruan materi produk hukum;
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

4. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
5. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia;
6. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

### **C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

#### **I. PROGRAM UTAMA**

##### **1. Program Pembentukan Produk Hukum**

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat produk hukum yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan produk hukum dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik.

##### **Kegiatan :**

- Mengkaji dan meneliti produk hukum dengan mendasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan;
- Harmonisasi produk hukum Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- Penyempurnaan dan perubahan serta pembaruan berbagai produk hukum yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan;
- Penyelenggaraan konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan;
- Penyelenggaraan forum konsultasi dalam menyusun prioritas rancangan produk hukum antara Pemerintah dan DPRD.

## **2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara pemerintahan agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

### **Kegiatan:**

- Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia;
- Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat;

- Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh hukum dan operasional;

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **1. Program Profesionalisme bagi aparat Hukum**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan professional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas masyarakat, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan lain sebagainya. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Garut.

#### **Kegiatan:**

- Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- Peningkatan kerjasama yang intensif dengan Pusat, aparat hukum dan lembaga bantuan hukum untuk penyelesaian masalah hukum.
- Koordinasi dalam pengawasan berbagai profesi hukum

### **3.4.9 Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Melalui Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Pelayanan Publik**

#### **Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998. Kedua Undangundang tersebut diperbaiki kembali melalui Undang-undang

Nomo 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

#### **Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar manajemen mulai Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang diwarnai dengan prinsip transparansi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada Sistem Perencanaan Pembangunan, perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

#### **Perwujudan Kelembagaan Demokratis Yang Makin Kokoh**

Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004

secara langsung, terbentuknya kelembagaan DPR, DPD dan DPRD baru hasil pemilihan umum langsung, pemilihan Kepala Daerah dengan aman dan tertib. Dalam waktu tiga tahun ke depan, pelaksanaan serta peningkatan kualitas kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk tersebut, akan terus dikembangkan perbaikan pola hubungan pemerintah dan masyarakat, penyelesaian persoalan sosial dan politik masa lalu, serta peningkatan peranan media komunikasi dan informasi akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

## **A. SASARAN**

### **1. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
2. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
4. Terkelolanya sumber dana dan asset-asset daerah serta pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional, keseimbangan bagian bagi hasil pemerintah pusat dari PPh badan dan cukai.

### **2. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab**

1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
2. Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

**3. Perwujudan Kelembagaan Demokratis Yang Makin Kokoh**

1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik, kemasyarakatan, pers dan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik;

**B. ARAH KEBIJAKAN**

**1. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalian sumber dana dan bagian bagi hasil pajak pusat (PPH badan dan cukai) pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya;

4. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di seluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi;
5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan asset-asset daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah; serta
6. Menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

## **2. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab**

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
2. Menyusun rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif;
3. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.

**3. Perwujudan Kelembagaan Demokratis yang Makin Kokoh**

1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances;
2. Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*);
3. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah.

**C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN**

**I. PROGRAM DASAR/ UTAMA**

**I.1 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

**1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat;

- Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat;
- Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
- Pemanfaatan teknologi informasi pada kelembagaan Pemerintah Daerah.
- Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas;

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. Program ini diarahkan ke seluruh Kabupaten Garut.

### **Kegiatan:**

- Peningkatan sumber pendapatan dan pembiayaan Daerah;
- Optimalisasi pengelolaan asset-asset;
- Peningkatan kualitas pelayanan, penataan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan Daerah.

## **I.2 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab**

### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

#### **Kegiatan :**

- Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
- Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
- Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS.
- Menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan
- Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan penegakan hukum disiplin.

### **2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menjangkau kepentingan masyarakat dan

dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Meningkatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik dan dunia usaha;
- pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
- Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik

**3. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah**

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
- Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
- Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.
- Mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten

- Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional.

### **I.3 Perwujudan Kelembagaan Demokratis yang Makin Kokoh**

#### **1. Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsifungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kaupaten Garut.

##### **Kegiatan:**

- Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral;
- Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif;
- Fasilitasi pemberdayaan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
- Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances di antara lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan;
- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis.

## **II. PROGRAM PENUNJANG**

### **II.1 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

#### **1. Program Peningkatan Kerjasama.**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama dengan Luar Negeri termasuk peningkatan peran pemerintah

provinsi. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Peningkatan peran Bupati untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya;
- Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah;
- Fasilitasi kerja sama.
- Penyusunan dan penetapan produk hukum tentang kerjasama antar daerah;
- Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan;

## **II.2 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab**

### **1. Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat disusun perencanaan yang terpadu, sinergis dan terintegrasi berbasis masyarakat. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Penyusunan perencanaan Pembangunan
- Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan
- Penguatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan

- Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- Penyediaan data base perencanaan makro, mikro, data spasial dan mantri statistik.
- Pengukuran indikator kinerja kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

## **2. Program Penataan Kelembagaan dn Ketatalaksanaan**

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

### **Kegiatan:**

- Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip good governance;
- Menyempurnakan sistem administrasi pemerintahan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;
- Menyempurnakan struktur jabatan.
- Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien; dan
- Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

## **3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara**

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien

dan efektif serta terpadu Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.

**4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi rakyat. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

**Kegiatan:**

- Pengembangan dan pendayagunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan pelayanan masyarakat;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi;
- Peningkatan profesionalisme aparat di bidang komunikasi dan informasi;
- Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi;
- Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi.

## **II.3 Perwujudan Kelembagaan Demokratis yang Makin Kokoh**

### **1. Program Perbaikan Proses Politik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan uji kelayakan publik, serta pelebagaan perumusan kebijakan publik. Program ini diarahkan ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut.

#### **Kegiatan:**

- Peningkatan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif;
- Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil; serta
- Pengembangan mekanisme konsultasi publik/partisipasi sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan.
- Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon kepala daerah;
- Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik